



PENETAPAN

Nomor: 102/Pdt. P/2023/PN Pms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Setelah membaca;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 102/Pdt.P/2023/PN Pms tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PN Pms atas nama:

HARIS MUNANDAR DAULAY , Tempat tanggal lahir Pematangsiantar 13

November 1987, Agama, Islam , Pekerjaan Wiraswasta , beralamat di

Jl.Bulu Tangkis No.06 Kel. banjar Kec. Siantar Barat Kota

Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PITHER ALEX**

SANDER HAREFA, S.H Advokat dan konsultan hukum pada kantor

Advokat dan Konsultan Hukum **HAREFA & PARTNERS**, yang

berkantor di Jalan Pisang Raja Kelurahan Bahsorma Kecamatan

Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor: 102/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Perkawinan Alm. HASAN DAULAY dan Almh. NGATEMI ;
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia
3. Bahwa Ayah Pemohon (Alm. HASAN DAULAY) yang lahir di Pematangsiantar tanggal 07 Desember 1934 telah meninggal dunia di

Halaman 1 dari 5 Perkara Perdata No.102/Pdt.P/2023/PN Pms



Pematangsiantar tanggal 03 November 1994 karena sakit sebagaimana berdasarkan Surat keterangan dari lurah banjar Kota Pematangsiantar;

4. Bahwa Pemohon sebagai anak dari ayah Alm. HASAN DAULAY belum sempat mencatatkan akta kematian di kantor Capil Kota Pematangsiantar;

5. Bahwa Pencatatan Akta kematian ayah pemohon yaitu Alm. HASAN DAULAY guna untuk dalam urusan administrasi di masa depan dan juga pengurusan dalam hal masalah warisan dari alm. Ayah pemohon yaitu HASAN DAULAY ;

6. Bahwa untuk sahnya pencatatan Akte kematian almarhum ayah Pemohon dan surat-surat yang berkaitan atas kepunyaan Pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;

7. Bahwa agar Akte Kematian tersebut dapat dicatatkan kembali ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Akte Kematian almarhum ayah pemohon yaitu HASAN DAULAY dan menerbitkan Akte Kematian yang dikeluarkan dinas Pendudukan dan Catatan sipil Kota Pematangsiantar yang terbaru bagi pemohon;

8. Bahwa terjadinya permohonan ini, maka pantas dan patut secara hukum kalau pemohon di hukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar ,kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-/bukti dari pemohon

Halaman 2 dari 5 Perkara Perdata No.102/Pdt.P/2023/PN Pms



ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akte kematian dari Almarhum HASAN DAULAY
3. Memerintahkan agar Akte Kematian Almarhum HASAN DAULAY tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Akte Kematian almarhum HASAN DAULAY (ayah pemohon) dan menerbitkan Akte kematian yang dikeluarkan dinas Pendudukan dan Catatan sipil Kota Pematangsiantar bagi pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan pencabutan permohonan tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa undang-undang secara khusus tidak mengatur mengenai pencabutan permohonan, namun sepanjang penetapan dari pengadilan belum dibacakan, maka pencabutan permohonan yang merupakan hak pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PN Pms telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka dengan dicabutnya permohonan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PN Pms tersebut harus dicoret dari register perkara yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PN Pms, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PN Pms atas nama **Haris Munandar Daulay**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencoret permohonan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PN Pms tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SINTA R. RITONGA.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SINTA R. RITONGA.,SH.

RENNI PITUA AMBARITA., SH.,MH

Perincian Biaya :

| | |
|-------|-----------------|
| ----- | PNBP Permohonan |
| ----- | Rp. 30.000,- |
| ----- | Biaya Proses |
| ----- | Rp. 70.000,- |
| ----- | Meterai |
| ----- | Rp. 10.000,- |
| ----- | Redaksi |
| ----- | Rp. 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PNBP Panggilan----- Rp.
10.000,-

-----PNBP Cabut Permohonan----- Rp.
10.000,-

J U M L A H-----Rp. 140.000,-
----- (seratus empat puluh ribu rupiah)